

ABSTRAK

Gedofridus Ambut. 21.75.7074. ***Peranan Etika Publik dalam Meminimalisasi Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power) di Indonesia***. Skripsi. Program Sarjana, Program Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan konsep etika publik dan realitas tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di Indonesia, (2) mendeskripsikan dan menjelaskan peranan etika publik dalam meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di Indonesia.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah konsep mengenai etika publik dan peranannya dalam meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia merupakan problem kronis yang tidak pernah usai hingga dewasa ini. Banyak keputusan, kebijakan dan tindakan yang diambil oleh para pejabat publik di Indonesia yang bertentangan dengan kepentingan umum. Mereka menggunakan kekuasaan hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu saja. Dengan melihat fenomena ini, maka diperlukan peranan etika publik sebagai upaya untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.

Etika publik merupakan pedoman moral bagi para pejabat publik dalam mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan yang bersih, jujur, adil, tanggungjawab dan bebas dari berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Etika publik akan mendorong para pejabat publik untuk selalu memperjuangkan kepentingan publik dalam setiap keputusan, kebijakan dan tindakan yang mereka ambil. Ada beberapa peranan etika publik dalam meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia yakni; *Pertama*, menjamin efektivitas pelayanan publik dengan menyusun standar pelayanan publik dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan publik. *Kedua*, meningkatkan integritas pejabat publik melalui pelatihan etika dan penerapan kode etik. *Ketiga*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Kata Kunci: Etika Publik, Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Peranan Etika Publik

ABSTRACT

Gedofridus Ambut. 21.75.7074. ***The Role of Public Ethics in Minimizing Abuse of Power in Indonesia***. Thesis. Bachelor's Program, Philosophy Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology. 2025.

This research aims to (1) describe and explain the concept of public ethics and the reality of acts of abuse of power (*Abuse of power*) in Indonesia, (2) describe and explain the role of public ethics in minimizing acts of abuse of power (*Abuse of power*) in Indonesia.

The method used in this study is qualitative descriptive. The object of study is the concept of public ethics and its role in minimizing acts of abuse of power (*Abuse of power*) in Indonesia. Based on the results of the study, it is concluded that acts of abuse of power in Indonesia are a chronic problem that has never ended until today. Many decisions, policies and actions taken by public officials in Indonesia are contrary to the public interest. They use power only to fight for personal interests and certain groups. By looking at this phenomenon, the role of public ethics is needed as an effort to minimize acts of abuse of power in Indonesia.

Public ethics is a moral guideline for public officials in realizing the administration of power that is clean, honest, fair, responsible and free from various forms of abuse of power. Public ethics will encourage public officials to always fight for the public interest in every decision, policy and action they take. There are several roles of public ethics in minimizing acts of abuse of power in Indonesia, namely; *First*, ensuring the effectiveness of public services by compiling public service standards and implementing public service principles. *Second*, improving the integrity of public officials through ethics training and the implementation of the code of ethics. *Third*, increasing transparency and accountability in the administration of power.

Keywords: Public Ethics, Acts of Abuse of Power and the Role of Public Ethics